

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adies Saputra, (2006) Pemekaran Daerah Dan Implikasi Pada Pembangunan, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 5, No. 1, H. 73
- Allan Miftahulakhyar, “Sistem Pemerintahan Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin,” *kompasiana. Com* 2023, https://www.kompasiana.com/allanmiftahulakhyar/5dae8acb097f3639c07d1374/sistem-pemerintahan-islam-pada-masa-khulafaur-asyidin?page=all&page_images=1
- Andik Wahyun Muqoyyidin, (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, h. 292
- Anggara Sahya, (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 36
- Arief Maulana, (2019) Faktor-Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru Dan Dampak Terhadap Keuangan Negara, *jurnal Natapraja* vol. 7. no 2.
- BPS Kabupaten Lebak, Kabupaten lebak dalam angka 2024,..h. 46.
- BPS Kabupaten Lebak, Kabupaten lebak dalam angka 2024,...h. 295
- BPS Kabupaten Lebak, Kabupaten lebak dalam angka 2024. (Lebak: Kabupaten Lebak, 2024).
- BPS Kabupaten Lebak, Kecamatan Banjarsari Dalam Angka 2024, (Lebak: Kabupaten lebak, 2024) h. 7
- BPS Kabupaten Lebak, Kecamatan Bayah Dalam Angka 2024, (Lebak: Kabupaten lebak, 2024) h.7
- BPS Kabupaten Lebak, Kecamatan Cibeber Dalam Angka 2024, (Lebak: Kabupaten lebak, 2024) h. 7.

BPS Kabupaten Lebak, Kecamatan Cigemblong Dalam Angka 2024, (Lebak: Kabupaten lebak, 2024) h. 7.

BPS Kabupaten Lebak, Kecamatan Cihara Dalam Angka 2024, (Lebak: Kabupaten lebak, 2024) h. 7.

BPS Kabupaten Lebak, Kecamatan Cijaku Dalam Angka 2024, (Lebak: Kabupaten lebak, 2024) h. 7.

BPS Kabupaten Lebak, kecamatan cilograng dalam angka 2024, (Lebak: Kabupaten lebak, 2024) h. 7.

BPS Kabupaten Lebak, Kecamatan Malingping Dalam Angka 2024 (Lebak: Kabupaten Lebak, 2024) h. 8.

BPS Kabupaten Lebak, Kecamatan Panasalam Dalam Angka 2024, (Lebak: Kabupaten lebak, 2024) h.7.

BPS Kabupaten Lebak, Kecamatan Wanasalam Dalam Angka 2024, (Lebak: Kabupaten lebak, 2024) h. 7.

Dokumen

<https://adoc.pub/kabupaten-lebak-secara-topografi-memiliki-3-tiga-karakterist.html> Di akses pada tanggal 02 februari 2025 Pukul 15:28.

https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html?nav=false Di akses pada pukul 09:27 wib

<https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-otonomi-daerah/> Di akses pada pukul 21:46 wib

<https://id.weatherspark.com/y/126577/Cuaca-Rata-rata-pada-bulan-in>

<https://kemenagkabbekasi.co.id/main/pentingnya-pembentukan-karakter-sejak-dini> Di akses pada pukul 16:21 wib

<https://lebakkab.go.id/profil-kabupaten-lebak/> Di akses pada pukul 08:37

<https://wawasankebangsaan.id/otonomi-daerah/> Di akses pada pukul 13:49 wib

<https://www.bantengate.id/mengenal-sosok-abuya-h-ibrahim-wedana-cilangkahan-pertama-di-banten-kidul/> Di akses pada hari selasa tanggal 17 juni 2025 pukul 16 : 18 wib

Inge Dwisvimiar, (2022). Tanggung Jawab Prinsipal Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Keagenan Dan Distributor, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 6, No.1, h. 54 Di akses Pada Tanggal 28 Januari 2025 Pukul 11: 43 wib

Jurnal

Lubis Ali Akhbar Mas Rabbani (2019). Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah, Hal 12.

Marzali Amri, (2012). *Antropologi dan Kebijakan Publik Jakarta*: Kencana Prenada Media Group, h20.

Mattew Nicky A.N Daud Munasto, (2024). Urgensi Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum Positif, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.

Rahmadana Muhammad fitri, (2022). *Teori teori tentang wilayah dan migrasi*, purwokerto selatan, h. 12

Rahmawati kusuma, (2011). Efektifitas kebijakan pemekaran wilayah terhadap penigkatan pelayanan publik. *Jurnal Hukum Jatiswara* Vol 2

Rahmawati Kusuma, (2011). Efektifitas Kebijakan Pemekaran Wilayah Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik, *jurnal Hukum Jatiswara*, vol 26 no. 3 h. 6-

Rahmawati Kusuma, (2011). Efektifitas Kebijakan Pemekaran Wilayah Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik, *jurnal Hukum Jatiswara*, vol 26 no. 3 h.10

Sayketi h. Rofii Adj, (2008). *Peran Masyarakat dalam Otonomi Daerah*. Klaten: Cempaka Putih, hlm. 4

Sholih Muadi, (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik, *Jurnal Review Politik* Vol 06, No 02, h. 197 Di akses pada pukul 22:28 wib

Tabrani Ahmad et al., (2019). *Perkembangan Islam Masa Khulafaur Rasyidin* Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam KEMEG RI.

Undang undang No 23 tahun 2014

Undang-Undang

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Adhi Bangsawan Sebagai Akademisi dan Pengurus Bakor Cilangkahan.

Wawancara dengan Bapak Akhmad Zajuli sebagai Ketua bidang Kondolidasi Forkomnas PP DOB Se-Indonesia dan Pengurus Bakor Cilangkahan.

Website

Wibowo Catur BS, (2018). *DESENTRALISASI, OTONOMI DAERAH DAN POLITIK LOKAL DI INDONESIA*. Indocamp Jakarta selatan, Hal 56-57.

Wibowo Catur,(2018). *Desentralisasi, Otonomi Daerah dan Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: Indocamp. h. 56-57